

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PADA SUKU NIAS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait perlindungan hukum terhadap Perempuan sebagai ahli waris di dalam suku nias yang di anggap masih menganut sistem patrilineal. Di dalam suku nias sering kali Perempuan di kesekiankan di karenakan di anggap suatu hari akan meninggalkan keluarganya setelah menikah. Hal ini justru bertolak belakang dengan hukum nasional dan hak asasi manusia yang menjunjung tinggi persatuan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Nias dan bagaimana harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dapat diwujudkan.

Metode penelitian yang di gunakan Adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Data data yang di peroleh di ambil dari dokumen relevan,literatur hukum,dan peraturan perundang undangan. Dari hasil pembahasan dapat kita lihat bahwa meskipun hukum nasional menjamin hak serta keadilan sosial bagi setiap warga negara dalam mendapatkan hak tanpa perpedaan gender justru pada implementasinya di masyarakat adat Nias masih menghadapi hambatan budaya dan sosial sehingga mereka akan terus berpedoman dengan kebiasaan atau aturan adat wilayah nias itu sendiri. Yang menjadi Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bagaimana negara menjamin serta memebrikan perlindungan terhadap hak setiap warganya serta terus merevolusi dan penguatan dalam menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. Yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu perlunya edukasi hukum baik melalui pendekatan dialogis dan partisipatif sehingga dapat menjadi motivasi bagi mayarakat serta peningkatan kesadaran hukum di tingkat local.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, ahli waris, hak perempuan

**LEGAL PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS AS HEIRS OF THE
NIAS TRIBE
ABSTRAK**

This research aims to examine more deeply the legal protection of women as heirs within the Nias ethnic group, which is still considered to adhere to a patrilineal system. In Nias society, women are often marginalized because they are perceived as eventually leaving their families after marriage. This practice stands in stark contrast to national law and human rights principles, which uphold unity and social justice for all Indonesian citizens. Based on this background, the research problem is formulated as follows: What is the form of legal protection for women as heirs in the Nias customary community, and how can harmonization between customary law and national law be achieved?

The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The data collected comes from relevant documents, legal literature, and statutory regulations. From the discussion, it can be seen that although national law guarantees rights and social justice for every citizen regardless of gender, in practice, the Nias customary community still faces cultural and social barriers. As a result, they continue to adhere to local customs and traditional rules specific to the Nias region.

The conclusion of this research emphasizes the role of the state in ensuring and providing protection for the rights of all its citizens.

Keywords: *legal protection, heir, women's rights*

